

KAJIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KARAKTER DI SMA DAN SMK
STUDY ON THE IMPLEMENTATION OF CHARACTER EDUCATION IN SENIOR HIGH SCHOOL (SMA) AND VOCATIONAL SCHOOL (SMK)

Sudiyono

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang Kemdikbud
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta
e-mail:sudiyono_d@ymail.com

Diterima: 29/02/2016; dikembalikan untuk direvisi: 29/03/2016, disetujui: 16/04/2016

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan pendidikan karakter, guna mendapatkan opsi kebijakan tentang strategi pendidikan karakter di sekolah. Metode penelitian menggunakan survei, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan analisis data menggunakan statistik deskriptif. Penelitian dilaksanakan di 10 kab/kota dengan sampel 40 SMA dan 40 SMK. Responden adalah kepala dinas pendidikan 10 orang, kepala sekolah 80 orang, guru 320 orang, dan siswa 800 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi kebijakan pemerintah daerah sebagian besar belum menerbitkan peraturan daerah yang terkait dengan pendidikan karakter. Sementara pada tingkat sekolah, kebijakan pelaksanaan pendidikan karakter umumnya dilaksanakan mengacu pada visi dan misi sekolah, sebagian besar sekolah mengintegrasikan dalam pembelajaran, pembiasaan, dan pembudayaan. Pelaksanaan pembiasaan dan pembudayaan yang dilakukan oleh guru masih belum konsisten, dan belum dievaluasi secara periodik. Direkomendasikan perlu adanya penguatan dan pembudayaan secara konsisten pelaksanaan pendidikan karakter dengan mengacu pada praktik sekolah terbaik dan meminimalkan hambatan pelaksanaannya.

Kata Kunci: Pendidikan karakter, kebijakan pendidikan karakter, Pendidikan Menengah (SMA dan SMK).

ABSTRACT

This study aimed to obtain information on the implementation of character education in academic and vocational high school in order to develop strategic policy options on character education in schools. The method used was survey, descriptive qualitative approach and data analysis using descriptive statistics. The research was conducted in 10 districts/cities with a sample of 80 schools (40 academic schools and 40 vocational schools). Respondents involved were 10 district head of education offices, 80 principals, 320 teachers, and 800 students. The results showed that in terms of policy, most regional government had yet to issue local regulations related to character education. While at the school level, policy implementation was generally implemented in reference to the vision and mission of the school. The vast majority of schools integrated learning, habituation, and familiarization. Implementation of habituation and familiarization done by teachers were still inconsistent, and had not been evaluated periodically. One of policy recommendation is the need to strengthen and develop a consistent implementation of character education referencing to the best practices and to minimize obstacles in implementation.

Keywords: *Character education, character education policy, Secondary Education (high school and vocational).*

PENDAHULUAN

Sumber daya manusia merupakan aset sebuah bangsa yang dapat menentukan kemajuan sebuah negara. Sumberdaya daya manusia yang bermutu ditandai dengan adanya penguasaan di berbagai bidang, antara lain ilmu pengetahuan, teknologi, budaya serta memiliki akhlak dan karakter yang terpuji. Pasal 31 ayat 3 UUD 1945 menyebutkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang ditujukan untuk meningkatkan akhlak mulia. Selanjutnya pada Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia yang berakhlak mulia.

Dirumuskannya akhlak mulia dalam tujuan pendidikan nasional menunjukkan bahwa akhlak atau karakter merupakan suatu nilai yang penting sebagai dasar pada kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karakter adalah nilai-nilai yang khas baik (tahu nilai kebaikan, mau berbuat baik, nyata berkehidupan baik, dan berdampak baik terhadap lingkungan) yang terpatери dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku (Kemdikbud, 2010).

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, arus globalisasi, perdagangan

bebas, serta tantangan pembangunan nasional pada pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang antara lain berupa terjadinya kerenggangan sosial, pola hidup konsumtif, kesenjangan sosial dan kurangnya toleransi antarindividu dan kelompok masyarakat sehingga menjadikan pola kekerabatan semakin berkurang. Gejala ini sering memicu terjadinya tindak kejahatan sosial seperti; konflik antarsuku, tawuran di kalangan mahasiswa, pelajar, dan antar-kampung, kekerasan dalam rumah tangga, korupsi, pencurian, pergaulan bebas, pelecehan seksual, penyalahgunaan obat, narkoba, dan lain-lain. Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga terjadi pergeseran nilai etika yang mengarah pada sikap dan perilaku yang kurang positif, seperti memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa, dan ancaman disintegrasi bangsa.

Tindak kekerasan dalam kehidupan bermasyarakat yang bertentangan dengan nilai-nilai karakter diantaranya adalah kekerasan pelajar. Data kekerasan pelajar menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) mencatat terdapat 229 kasus kekerasan antarpelajar sepanjang Januari-Oktober tahun 2013. Jumlah kekerasan tersebut meningkat cukup berarti, karena pada tahun 2012 hanya terjadi 128 kasus. Dari 229

kasus kekerasan antarpelajar SMP dan SMA itu, 19 siswa meninggal dunia. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pendidikan kita masih cenderung mengejar kemampuan akademis semata, belum mementingkan pendidikan karakter (Erwan Hendarwan, 2013).

Jenis penyimpangan perilaku lainnya di kalangan pelajar yang memprihatinkan adalah penggunaan narkoba dan zat aditif lainnya. Deputi Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat sebanyak 22 persen pengguna narkoba di Indonesia berasal dari kalangan pelajar. Jumlah tersebut menempati urutan kedua terbanyak setelah pekerja yang menggunakan narkoba. Dari 70 persen pengguna di kalangan pekerja tersebut merupakan pemakai lanjutan, artinya sejak lama mereka sudah menggunakan narkoba (Andika, 2013). Tingginya penggunaan Narkoba oleh pelajar tersebut diduga disebabkan oleh berbagai faktor baik dari dalam maupun faktor dari luar diri pelajar. Faktor dari dalam diri terjadi sebagai bentuk pelarian berbagai masalah hidup seperti kurang harmonisnya dalam kehidupan keluarga. Faktor dari luar timbul antara lain adalah pergaulan bebas sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari (Libertus Jehani, 2006). Bentuk-bentuk perilaku menyimpang lain yang dilakukan siswa SMA antara lain berkelahi, berpakaian tidak rapi, membolos sekolah membawa barang yang tidak ada

hubungannya dengan kegiatan sekolah, sering terlambat masuk sekolah, merokok, tidak menggunakan baju sekolah, minum-minuman keras, mengkonsumsi obat dextro dan menghisap lem. Faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi siswa antara lain lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan faktor lingkungan sebaya (Jonaidi, 2013).

Berbagai fenomena sebagaimana disebutkan di depan jelas tidak dapat dikatakan sebagai suatu kehidupan yang berkarakter dan beradab, dan amat bertentangan dengan nilai-nilai falsafah hidup Pancasila yang didukung oleh bangsa Indonesia. Bukan itu saja, segenap fenomena itu dipastikan bertentangan dengan upaya mencapai tujuan pendidikan, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003.

Sebagai upaya menciptakan peserta didik yang berkarakter Pemerintah menjadikan pembangunan karakter sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional, yang ditegaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, bahwa pendidikan karakter ditempatkan sebagai landasan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional, yaitu “Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.” Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan antara lain telah mencanangkan Kebijakan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa.

Pencanangan pendidikan karakter tersebut ditetapkan melalui Rencana Aksi Nasional (RAN) pendidikan karakter pada tahun 2010.

Walaupun Pemerintah telah berupaya menetapkan kebijakan penguatan pendidikan karakter, namun gejala penyimpangan perilaku siswa masih sering terjadi dan semakin memprihatinkan. Perilaku siswa cenderung kurang hormat terhadap orang tua dan guru, antara lain dipengaruhi oleh arus globalisasi yang semakin bebas serta kurangnya pembiasaan perilaku baik dari sekolah (Dewi Rohmah, 2012). Penyimpangan perilaku siswa yang tidak sesuai dengan nilai-nilai karakter juga disebabkan oleh kurangnya penerapan pendidikan karakter pada proses pembelajaran, perhatian guru, dan ketegasan kepala sekolah dalam menegakkan peraturan sekolah (Hery Nugroho, 2012).

Melihat kondisi tersebut kiranya perlu dikaji pelaksanaan pendidikan karakter pada jenjang pendidikan menengah, khususnya di SMA dan SMK. Selanjutnya perlu juga dikaji peran pemda/dinas yang membidangi pendidikan dan kepala sekolah dalam pelaksanaan pendidikan karakter, berikut pemahaman serta dampak penanaman nilai-nilai karakter di sekolah terhadap warga sekolah.

Terkait dengan permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini secara umum yaitu untuk menyusun bahan kebijakan tentang peningkatan pelaksanaan pendidikan karakter di SMA dan SMK. Secara khusus tujuan

penelitian ini untuk mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pendidikan karakter yang meliputi: (i) peran pemda/dinas pendidikan dalam mendukung pelaksanaan pendidikan karakter; (ii) peran kepala sekolah; (iii) pemahaman guru tentang pendidikan karakter; (iv) pelaksanaan pendidikan karakter di Sekolah; dan (v) dampak penanaman nilai-nilai karakter di sekolah terhadap warga sekolah.

KAJIAN PUSTAKA

Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter memiliki makna lebih tinggi dari pendidikan moral, karena bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, tetapi menanamkan kebiasaan tentang hal yang baik sehingga peserta didik menjadi paham (domain kognitif) tentang mana yang baik dan salah, mampu merasakan (domain afektif) nilai yang baik dan biasa melakukannya (domain perilaku). Jadi pendidikan karakter terkait erat dengan kebiasaan yaitu dengan melakukan kegiatan yang diulang-ulang dan terus menerus dipraktikkan atau dilakukan (Heri Gunawan, 2012).

Pendidikan Karakter merupakan rangkaian dari dua kata, yakni pendidikan dan karakter. Pengertian pendidikan adalah suatu usaha sadar dan sistematis dalam mengembangkan potensi peserta didik. Pendidikan karakter dapat didefinisikan: "Pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai budaya dan

karakter bangsa pada diri peserta didik, sehingga mereka memiliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya, sebagai anggota masyarakat, dan warga negara yang religius, nasionalis, produktif dan kreatif” (Kemdiknas, 2010a). Secara umum karakter diartikan sebagai watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (*virtues*) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Pendidikan karakter adalah pendidikan untuk membentuk kepribadian seseorang melalui pendidikan budi pekerti, yang hasilnya terlihat dalam tindakan nyata seseorang, yaitu tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, kerja keras, dan sebagainya (Thomas Lickona, 2012). Karakter itu erat kaitannya dengan kebiasaan yang kerap dimanifestasikan dalam tingkah laku (Aristoteles dalam Megawangi, 2009). Selanjutnya Russel Williams (dalam Megawangi, 2009) juga menggambarkan karakter laksana “otot” yang akan menjadi lembek jika tidak dilatih. Dengan latihan demi latihan, maka “otot-otot” karakter akan menjadi kuat dan akan mewujudkan menjadi kebiasaan (*habit*). Orang yang berkarakter tidak melaksanakan suatu aktivitas karena takut atau hukuman, tetapi karena mencintai kebaikan. Oleh karena cinta itulah, maka muncul keinginan untuk berbuat baik.

Dari perspektif lain, Karakter merupakan cara berpikir dan perilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup bekerjasama baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara (Suyanto, 2010). Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan akibat dari keputusan yang ia buat. Karakter merupakan gambaran dari kualitas moral seseorang yang tercermin dari segala tingkah lakunya yang mengandung unsur keberanian, ketabahan, kejujuran, dan kesetiaan (Yaumi, 2010).

Karakter mempunyai tiga bagian yang saling berhubungan yaitu: pengetahuan moral, perasaan moral, dan perilaku moral. Karakter yang baik terdiri dari mengetahui hal yang baik, menginginkan hal yang baik, dan melakukan hal yang baik, yaitu kebiaan dalam cara berpikir, kebiasaan dalam hati, dan kebiasaan dalam tindakan (Lickona, 2012).

Pendidikan karakter sejatinya bukanlah hal yang baru dalam khasanah pendidikan di Indonesia. Pendidikan karakter adalah nama lain dari pendidikan budi pekerti atau adab yang sudah sejak lama dikemukakan oleh Ki Hadjar Dewantara dengan semboyan sebagai metode among “*ing ngarso sung tulodho* (didepan diharapkan mampu memberi teladan atau contoh yang baik bagi pengikutnya), *ing madyo mangun karso* (ditengah memberikan dorongan atau semangat) *tut wuri handayani*”

(memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengembangkan bakat dan minatnya sebagai keluhuran dan kehalusan hidup manusia), (Daryanto 2013).

Dari berbagai pengertian tentang pendidikan karakter di atas maka definisi pendidikan karakter dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa pada diri peserta didik, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya, sebagai anggota masyarakat, dan warga negara yang religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, memiliki rasa ingin tahu, gemar membaca bersahabat/komunikatif, bertanggungjawab, menghargai prestasi, cinta damai, peduli lingkungan, peduli sosial, memiliki semangat kebangsaan dan cinta tanah air.

Pendidikan karakter bertujuan membentuk setiap pribadi menjadi insan yang berkeutamaan. Pada pendidikan karakter, yang terutama dinilai adalah perilaku, bukan pemahamannya (Kusuma, 2007).

Ruang lingkup pendidikan karakter tidak hanya melalui pendidikan formal di sekolah, akan tetapi juga melalui keteladanan dan pendampingan keluarga setiap hari, serta pengawasan dari lingkungan masyarakat. Pendidikan agama dan kesadaran akan nilai-nilai religius menjadi penggerak utama keberhasilan pendidikan karakter (Nugroho,

2012). Penanaman nilai-nilai pendidikan karakter membutuhkan latihan terus-menerus, keteladanan, dan pengkondisian di lingkungan sekolah, keluarga, serta masyarakat sehingga menjadi kebiasaan yang tercermin dalam perilaku peserta didik yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti unggul.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi karakter

Terbentuknya karakter (kepribadian) dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor alami atau fitrah (*nature*) dan faktor sosialisasi dan pendidikan (*nurture*). Faktor alami berasal dari aspek agama yang mengajarkan bahwa setiap manusia manusiapada dasarnya mempunyai kecenderungan (fitrah) untuk mencintai kebaikan. Faktor pendidikan merupakan usaha memberikan pendidikan dan sosialisasi yang berperan di dalam menentukan “buah” yang akan dihasilkan kelak dari seorang anak. Menurut para ahli psikologi perkembangan, setiap manusia memiliki potensi bawaan yang akan termanifestasi setelah dia dilahirkan, termasuk potensi yang terkait dengan karakter atau nilai-nilai kebajikan. Manusia pada dasarnya memiliki potensi mencintai kebajikan, namun bila potensi ini tidak diikuti dengan pendidikan dan sosialisasi setelah manusia dilahirkan, maka manusia dapat berubah menjadi binatang, bahkan lebih buruk lagi (ajaran Confucius, dalam Megawangi, 2004).

Potensi karakter yang baik dimiliki manusia sebelum dilahirkan, tetapi potensi tersebut harus terus-menerus dibina melalui sosialisasi dan pendidikan sejak usia dini. Oleh karena itu, sosialisasi dan pendidikan anak yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan yang baik di keluarga, sekolah, maupun lingkungan yang lebih luas – sangat penting dalam pembentukan karakter seorang anak.

Untuk membentuk karakter anak diperlukan syarat-syarat mendasar bagi terbentuknya kepribadian yang baik. Menurut Megawangi, ada tiga kebutuhan dasar anak yang harus dipenuhi, yaitu *maternal bonding*, rasa aman, dan stimulasi fisik dan mental.

Fungsi Pendidikan Karakter

Pendidikan nasional antara lain berfungsi membentuk watak, bertujuan antara lain untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3).

Pendidikan karakter merupakan salah satu upaya yang dirancang untuk menanamkan nilai-nilai perilaku peserta didik yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat (Kemdiknas, 2010a).

Dengan demikian pendidikan karakter memiliki fungsi yaitu (i) membangun kehidupan kebangsaan yang multikultural; (ii) membangun peradaban bangsa yang cerdas, berbudaya luhur, dan mampu berkontribusi terhadap pengembangan kehidupan umat manusia; mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik serta keteladanan baik; (iii) membangun sikap warganegara yang cinta damai, kreatif, mandiri, dan mampu hidup berdampingan dengan bangsa lain dalam suatu harmoni (Kemdiknas, 2010a).

Sesuai dengan kebijakan nasional pembangunan karakter bangsa tahun 2010-2025, fungsi pendidikan karakter bangsa adalah sebagai berikut.

- a. Pembentukan dan pengembangan potensi, yaitu membentuk dan mengembangkan potensi manusia atau warga negara Indonesia agar berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik sesuai dengan falsafah hidup Pancasila.
- b. Perbaikan dan Penguatan, yaitu memperbaiki karakter manusia dan warga negara Indonesia yang bersifat negatif dan memperkuat peran keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah untuk ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam pengembangan potensi manusia atau warga negara menuju bangsa yang berkarakter, maju, mandiri, dan sejahtera.
- c. Penyaring, yaitu memilah nilai-nilai budaya bangsa sendiri dan menyaring nilai-

nilai budaya bangsa lain yang positif untuk menjadi karakter manusia dan warga negara Indonesia agar menjadi bangsa yang bermartabat.

Nilai-nilai Dalam Pendidikan Karakter

Nilai-nilai karakter yang perlu ditanamkan kepada peserta didik adalah nilai-nilai universal seluruh agama, tradisi, dan budaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai universal ini harus dapat menjadi perekat seluruh komponen bangsa walaupun berbeda latar belakang budaya, suku, dan agama. Nilai-nilai pendidikan karakter yang terkait dengan perbuatan baik terdapat beragam pilar yang dikemukakan oleh penulis-penulis pendidikan karakter, diantaranya adalah Megawangi (2009) yang dirangkum menjadi sembilan pilar yaitu: (i) cinta Tuhan dan segenap ciptaan-Nya, (ii) tanggung jawab, disiplin dan mandiri; (iii) jujur/amanah dan arif; (iv) hormat dan santun; (v) dermawan, suka menolong, dan gotong-royong; (vi) percaya diri, kreatif dan pekerja keras; (vii) kepemimpinan dan adil; (viii) baik dan rendah hati; (ix) toleransi, cinta damai dan kesatuan. Orang yang memiliki karakter baik adalah orang yang memiliki kesembilan pilar karakter tersebut (Megawangi, 2009).

Rumusan nilai-nilai yang dikembangkan pemerintah (Kemdiknas, 2010) dalam pendidikan karakter dan budaya bangsa diidentifikasi dari sumber-sumber berikut.

- a. Agama: kehidupan individu, masyarakat, kenegaraan dan bangsa Indonesia selalu didasari pada ajaran agama dan kepercayaannya.
- b. Pancasila, Negara kesatuan Republik Indonesia ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan berpolitik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan, budaya, dan seni.
- c. Budaya, Nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat menjadi dasar pemberian makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antar anggota masyarakat sehingga posisi budaya menjadi sumber nilai dalam pendidikan karakter an budaya bangsa.
- d. Tujuan Pendidikan Nasional: menjadi acuan rumusan kualitas yang harus dimiliki oleh setiap warga Negara Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode survei, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh gambaran yang mendalam dan komprehensif tentang penyelenggaraan pendidikan karakter menyangkut aspek kebijakan, pelaksanaan, dampak, dan kendala-kendala yang dihadapi. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT), dan observasi. Kuesioner digunakan

untuk menjangkau informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan karakter yang bersifat umum, dan pendalamannya dilakukan melalui DKT, sedangkan observasi untuk melihat kondisi riil di sekolah. Pengumpulan data dilaksanakan di 10 kab/kota yang dilakukan dengan bertujuan pada setiap kab/kota dipilih 8 sekolah terdiri dari 4 SMA dan 4 SMK, kriterianya adalah sekolah yang telah melaksanakan pendidikan karakter. Sumber data dalam penelitian ini yaitu kepala sekolah (80 orang), guru (360 orang) dan siswa (800 orang). Guru yang menjadi responden adalah guru Matematika, PPkn, dan Bahasa Indonesia, sedangkan responden siswa berasal dari kelas II. Pengolahan data *kuantitatif* dilakukan melalui tahapan pemeriksaan data, pengkodean data, pemasukkan data, dan pembersihan data. Analisis data menggunakan statistik deskriptif setelah dalam bentuk persentase. Pengolahan data *kualitatif* dilakukan dengan mendeskripsikan, membandingkan mengkategorikan, dan menginterpretasikan yang diarahkan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian pelaksanaan pendidikan karakter di 80 SMA dan SMK menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan karakter memerlukan dukungan dari berbagai pihak,

baik dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, orangtua siswa, dan masyarakat. Hasil kajian tentang peran masing-masing dalam pelaksanaan pendidikan karakter disampaikan sebagai berikut.

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten

Kebijakan pemerintah daerah tentang pendidikan karakter, yang diharapkan dapat dijadikan dasar pelaksanaan pendidikan karakter oleh sekolah baik dalam bentuk aturan belum ada. Kebijakan yang menjadi acuan pelaksanaan pendidikan karakter masih bersifat umum yang di dalamnya terkait dengan nilai-nilai karakter seperti: ketertiban, peribadatan, dan kebersihan lingkungan. Bentuk kegiatannya antara lain terkait dengan program peduli lingkungan, kegiatan Jum'at bersih dan penanaman pohon. Kebijakan Jum'at bersih yang oleh sekolah dimaknai sebagai bentuk kebijakan pelaksanaan pendidikan karakter yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah. Kebijakan Pemerintah Daerah yang menjadi dasar pelaksanaan pendidikan karakter yaitu kurikulum muatan lokal (mulok) tentang lingkungan hidup.

Namun, secara umum (92,59 persen) pemerintah daerah telah mendukung pelaksanaan pendidikan karakter walaupun belum melalui kebijakan khusus berupa Perda

pendidikan karakter. Kegiatan lain yang juga diidentifikasi oleh sekolah sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah pada pelaksanaan pendidikan karakter adalah dengan diberikannya pelatihan pendidikan karakter pada guru dan kepala sekolah (85,19 persen). Bentuk pelatihan umumnya masih dalam bentuk sosialisasi program, dan belum sampai pada bentuk aplikasi program. Oleh sebab itu kepala sekolah dan guru belum memahami bagaimana implementasi pada tataran integrasi dalam pembelajaran.

Kebijakan Kepala Sekolah

Kebijakan kepala sekolah dalam menerapkan pelaksanaan pendidikan karakter pada masing-masing sekolah baik SMA maupun SMK sangat bervariasi. Terdapat beberapa kepala sekolah yang menerapkan pendidikan karakter yang dikembangkan dari visi dan misi sekolah, sebagian yang lain mengembangkannya dalam bentuk surat keputusan, dan ada yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara kepala sekolah dan para guru.

Selanjutnya kebijakan sekolah secara umum ada dua bentuk yaitu berupa SK (tertulis) dan lisan (tidak tertulis). Kedua kebijakan ini umumnya dikembangkan dari visi misi sekolah yang ditetapkan menjadi 5 sampai 10 nilai karakter yang disepakati sesuai dengan kondisi dan lingkungan sekolah. Pada kebijakan tertulis nilai-nilai yang ditetapkan didokumentasikan secara tertulis dan menjadi peraturan sekolah. Peraturan ini disampaikan

pada seluruh warga sekolah dan ditempel pada papan pengumuman sekolah, sedangkan pada kebijakan lisan kebijakan dan nilai-nilai karakter disampaikan kepada warga sekolah pada saat rapat dewan guru, rapat wali murid dan upacara bendera.

Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat 26,67 persen sekolah yang melaksanakan pendidikan karakter berdasarkan kebijakan kepala sekolah di SMA dan SMK dalam bentuk SK, 18,10 persen berdasarkan kesepakatan kepala sekolah dan guru, sedangkan yang didasarkan pada visi misi sekolah paling dominan yakni 39,05 persen, dan sisanya (16,18 persen) bervariasi dalam beberapa dasar lainnya. Dari data tersebut diketahui bahwa pelaksanaan pendidikan karakter paling banyak dilakukan adalah didasarkan pada visi dan misi sekolah. Bentuk ini paling banyak dipilih oleh sekolah dalam pelaksanaan pendidikan karakter karena visi dan misi tersebut berisi tentang program sekolah yang umumnya sudah dipahami oleh kepala sekolah, guru dan seluruh siswa sehingga lebih mudah untuk dilaksanakan.

Kebijakan sekolah menyangkut strategi pelaksanaan pendidikan karakter yang umumnya dilaksanakan oleh sekolah dapat dikelompokkan menjadi lima jenis, yakni integrasi dalam pembelajaran (ada 25,44 persen sekolah), perilaku keteladanan (21,55 persen), kegiatan ekstra kurikuler (21,2 persen), kegiatan rutin sekolah (19,79 persen),

dan kegiatan spontan (11,66 persen). Bentuk kegiatan pembiasaan umumnya dilakukan melalui, sholat berjamaah, tadarus, jumat bersih, bakti sosial, upacara bendera, dan pentas seni budaya. Pendidikan karakter yang banyak dirasakan dampaknya terhadap perubahan perilaku siswa umumnya dari kegiatan keteladanan dan pembiasaan. Bentuk kegiatan keteladanan antara lain menunjukkan sikap dan perilaku selalu menjaga ketertiban, seperti guru hadir lebih awal agar siswa tidak terlambat, guru berpenampilan rapi, bijaksana, peduli terhadap lingkungan dan lain-lain. Adapun bentuk pembiasaan melalui kegiatan upacara, pramuka, sholat berjamaah, Jumat bersih, dan lain-lain.

Kendati banyak kebijakan kepala sekolah yang mendukung pelaksanaan pendidikan karakter, namun umumnya belum dilaksanakan secara konsisten. Indikasinya antara lain aturan yang telah ditetapkan kepala sekolah yang tidak selalu ditegakkan. Hal ini disebabkan oleh belum adanya kebijakan dari pemerintah kabupaten/kota yang dapat dijadikan acuan mengikat bagi seluruh warga sekolah. Selain itu, kurangnya komitmen warga (guru, siswa, dan karyawan sekolah), sehingga pelaksanaan pendidikan karakter menjadi tidak maksimal. Oleh sebab itu masih sering terjadi tindakan-tindakan warga sekolah yang melanggar ketentuan nilai-nilai karakter yang telah ditetapkan, namun masih dibiarkan dan tidak ada sanksi yang semestinya diterapkan.

Upaya lain di beberapa sekolah dilakukan sistem pengawasan yang relatif ketat dengan memasang peralatan *Closed Circuit Television* (CCTV) untuk memantau siswa, guru dan karyawan sekolah terkait dengan kedisiplinan, kesopanan, kesusilaan, kekerasan, dan penyimpangan perilaku lain yang bertentangan dengan pengembangan nilai karakter. Sistem ini dinilai efektif oleh beberapa sekolah karena memudahkan dalam pengawasannya, kegiatan guru dan siswa di sekolah dapat terekam dan dapat dipantau dari ruang kepala sekolah. Jika ada siswa atau guru yang melanggar peraturan dapat dilihat di layar CCTV dan gambarnya dapat ditampilkan untuk bukti pelanggaran.

Program pendidikan karakter di sekolah perlu dievaluasi secara periodik agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Tampaknya prinsip tersebut telah dilakukan oleh sekolah. Ini tampak dari 63,79 persen kepala sekolah yang ternyata selalu melakukan evaluasi program pendidikan karakter yang dilakukan di sekolahnya. Namun, dari hasil FGD dan observasi, diketahui bahwa pelaksanaan evaluasi belum dilakukan secara konsisten dan menyeluruh. Evaluasi masih dilakukan setengah-setengah sebatas pada hal-hal tertentu, misalnya terbatasnya pada kehadiran guru dan siswa, serta kebersihan semata yang umumnya belum mengacu pada program/peraturan yang telah ditetapkan, bahkan belum menyimak indikator capaian program.

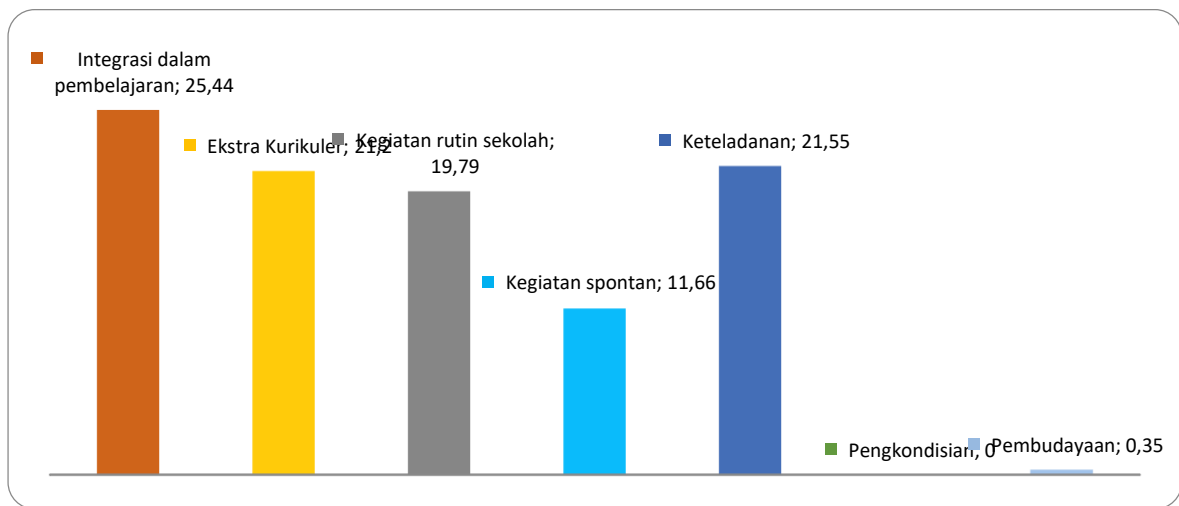
Pemahaman Guru tentang Konsep Pendidikan Karakter

Sekitar 85,53 persen guru telah memahami konsep pendidikan karakter. Namun, pemahaman mereka umumnya terbatas pada jumlah nilai karakter saja yang ada 18 nilai, sedangkan untuk penerapan dalam kegiatan pembelajaran dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam pembelajaran belum dipahami sepenuhnya. Diakui oleh para guru bahwa pengintegrasian nilai-nilai karakter dalam pembelajaran menuntut kreativitas guru. Guru harus mampu mengembangkan materi ajar dengan mengaitkan bentuk-bentuk kegiatan yang bermuatan nilai karakter. Ketidapahaman ini dimungkinkan erat kaitannya dengan keikutsertaan guru dalam pelatihan. Kondisi tersebut dapat dimaklumi karena dari 360 guru yang menjadi sampel penelitian ini 50persen guru menyatakan belum pernah mengikuti pelatihan pendidikan karakter, dan 50persen lainnya telah mengikuti pelatihan pendidikan karakter.

Guru-guru yang menyatakan pernah mengikuti pelatihan, ternyata juga belum dapat memahami sepenuhnya tentang praktek mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam pembelajaran. Ini disebabkan antara lain karena lama pelatihan yang dinilai sangat singkat, sedangkan materi pelatihan banyak sehingga para guru merasa kesulitan dan kurang tuntas memahaminya. Kurang lebih 65,03 persen guru yang ikut pelatihan menyatakan bahwa rata-rata lama pelatihan yang diikuti hanya antara 1-3 hari selebihnya antara 4-7 hari (16,56 persen guru) dan kurang dari satu hari (11,66 persen guru). Pelatihan yang kurang dari satu hari umumnya hanya sosialisasi yang dilakukan oleh kementerian pendidikan atau dinas pendidikan setempat.

Pelaksanaan Pendidikan Karakter

Pelaksanaan pendidikan karakter pada jenjang pendidikan menengah umumnya dilakukan melalui pendekatan integrasi dalam pembelajaran, kegiatan ekstra kurikuler, keteladanan, kegiatan rutin, dan kegiatan spontan.



Gambar 1. Strategi Pelaksanaan Program Pendidikan Karakter di Sekolah

Gambar 1 memperlihatkan berbagai strategi Pelaksanaan Program pendidikan Karakter di Sekolah. Tampak bahwa kegiatan “pembudayaan dan pengkondisian” umumnya kurang banyak dilakukan oleh sekolah. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai-nilai karakter belum membudaya di dalam kegiatan sekolah. Warga sekolah kurang memprioritaskan nilai-nilai karakter dalam kegiatan sehari-hari dan belum menjadi kebiasaan di kalangan pendidik dan warga sekolah seperti menghargai karya orang lain, menghargai hak orang lain, budaya membaca, budaya tidak menyontek dan lain-lain. Pelaksanaan pendidikan karakter yang paling dominan (25.44 persen) dilakukan oleh sekolah adalah melalui integrasi nilai-nilai karakter dalam pembelajaran. Hal ini sejatinya telah lama dilakukan sebelum diberlakukannya program pendidikan karakter oleh Pemerintah Pusat. Menurut para guru pelaksanaan pendidikan karakter yang paling mudah untuk dilakukan yaitu dengan mengintegrasikan nilai-nilai

karakter dalam pembelajaran, karena sebagian besar waktu siswa berada di kelas dan dihabiskan untuk mengikuti pembelajaran di sekolah. Namun, agar pelaksanaan pembelajaran dapat berhasil dengan baik maka guru perlu menyusun rencana program pembelajaran (RPP) yang benar dan baik. Penyusunan RPP yang benar dan baik merupakan langkah awal untuk memberikan acuan yang jelas dalam menerapkan nilai-nilai karakter melalui integrasi kedalam mata pelajaran. RPP ini menjadi pegangan dan pedoman guru dalam mengimplementasikan pelaksanaan pembelajaran karakter yang konsisten di dalam kelas. Pelaksanaan pendidikan karakter melalui integrasi dalam pembelajaran dilakukan untuk memberikan aspek pengetahuan tentang nilai-nilai karakter agar siswa memahami nilai-nilai karakter yang diharapkan dapat menjadi pedoman dalam kegiatan sosial berkehidupan dan bermasyarakat.

Penanaman nilai-nilai karakter dalam pembelajaran diidentifikasi dari perencanaan pembelajaran (RPP), pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Penelusuran pelaksanaannya dalam studi ini difokuskan pada empat mata pelajaran yaitu: matematika, bahasa Indonesia, sejarah, dan Pkn. Hasilnya belum semua guru pada mata pelajaran tersebut telah mengintegrasikan dan melaksanakan pendidikan karakter sepenuhnya dengan beberapa alasan.

Pada penyusunan RPP, 85,53 persen guru menyatakan bahwa mereka selalu menyusun RPP sebelum pelaksanaan pembelajaran dan juga telah memasukkan nilai-nilai karakter yang bersumber dari 18 nilai karakter pada mata pelajaran yang diampunya. Umumnya nilai-nilai yang dimasukkan, dalam RPP adalah; nilai-nilai religius, kejujuran, toleransi, disiplin, dan tanggungjawab. Kendati demikian dari hasil FGD dengan para guru diketahui bahwa pada kegiatan pembelajaran terkadang nilai-nilai karakter yang telah disusun pada RPP tidak selalu disampaikan dalam pembelajaran, dan sebaliknya nilai-nilai yang tidak tercantum dalam RPP disampaikan dalam pembelajaran. Hal ini terkait dengan tingkat kesulitan materi dan kemampuan guru dalam mengembangkan materi yang akan diberikan kepada siswa.

Untuk memastikan bahwa guru telah menyampaikan nilai-nilai karakter dalam pembelajaran, umumnya para guru

melakukan kegiatan pendahuluan dengan memasukkan nilai-nilai karakter seperti memberikan salam dan pertanyaan sebagai apersepsi serta berdoa (83.63 persen), dan mengingatkan kembali nilai-nilai karakter yang sebelumnya pernah dipelajari.

Dari perspektif siswa, diketahui bahwa 80,5 persen siswa menyatakan bahwa pada pelajaran matematika frekuensi guru memasukkan nilai-nilai karakter dalam pembelajaran. Nilai karakter karakter yang sering disampaikan tentang kejujuran, disiplin, dan kreativitas. Pada pelaksanaannya masing-masing guru bervariasi dalam menerapkan, misalnya nilai kejujuran dilakukan saat siswa mengerjakan soal-soal individu, guru mengkondisikan supaya siswa dapat mengerjakan tugasnya berdasarkan kemampuannya bukan karena mendapat hasil contekan dari teman. Nilai disiplin diberikan guru dengan meminta siswa untuk mengumpulkan apa yang menjadi tugasnya sesuai waktu yang ditentukan. Jika ada anak yang melewati waktu yang ditentukan, maka akan diberikan hukuman pengurangan nilai, dan nilai kreatif diberikan oleh guru dengan memberi kebebasan siswa menjawab soal dengan rumus yang mereka tahu, tidak hanya terpaku pada rumus baku yang diberikan oleh guru.

Pada pelajaran sejarah 79,19 persen siswa menilai bahwa guru umumnya telah memasukkan nilai-nilai karakter dalam

pembelajaran. Nilai-nilai karakter yang diintegrasikan dalam mata pelajaran sejarah antara lain; nilai-nilai tentang cinta tanah air, semangat kebangsaan dan demokrasi. Materi pembelajarannya mengangkat kisah tentang jaman penjajahan (imperialism) yang menampilkan masyarakat pada masa itu.

Demikian pula pada mata pelajaran Bahasa Indonesia menurut persepsi siswa guru pelajaran Bahasa Indonesia secara umum telah memasukkan nilai-nilai karakter dalam pembelajaran. Hal ini disampaikan oleh 59,70 persen responden siswa yang menyatakan bahwa guru selalu memasukkan nilai-nilai karakter dalam pembelajaran. Nilai-nilai karakter yang ditanamkan umumnya gemar membaca, menghargai prestasi dan mandiri. Bentuk penanamannya antara lain dengan mencari tayangan tentang sesuatu untuk disimak dan dianalisis siswa. Bentuk lainnya misalnya melalui cerpen yang mengandung nilai karakter. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen yang disampaikan dan digali maknanya dalam proses pembelajaran. Pada pelajaran PPKn para guru umumnya juga telah memasukkan nilai-nilai karakter dalam pembelajaran. Hal ini disampaikan oleh 58,68 persen yang menyatakan bahwa guru selalu menyampaikan nilai-nilai karakter dalam pembelajaran dengan memasukkan nilai-nilai budaya dan adat istiadat. Nilai-nilai karakter tersebut diintegrasikan ke dalam mata pelajaran PPKn melalui materi-materi yang diambil dari kejadian aktual yakni peristiwa

yang sedang menjadi topik pembahasan di masyarakat saat ini.

Evaluasi hasil pembelajaran pendidikan karakter diketahui tidak ada penilaian secara khusus tetapi terintegrasi pada mata pelajaran. Misalnya, pendidikan karakter yang terintegrasi dalam PPKn, maka nilai pendidikan karakter tidak berupa nilai tersendiri melainkan sudah terintegrasi dalam PPKn sebagai mata pelajaran.

Selain melalui integrasi dalam pembelajaran pendidikan karakter juga dilakukan melalui kegiatan ekstra kurikuler. Salah satu contoh kegiatan ekstrakurikuler adalah pramuka, yang wajib diikuti seluruh siswa karena sarat akan pengembangan nilai-nilai pendidikan karakter diantaranya yaitu nilai tanggung jawab, disiplin, kemandirian, kreatif, peduli sosial, peduli lingkungan, dan bersahabat/komunikatif. Kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang sering dilaksanakan di sekolah yaitu pendalaman kerohanian Islam dan Kristen untuk penanaman nilai religius, Kelompok Pencinta Lingkungan untuk penanaman nilai peduli lingkungan.

Dampak Pelaksanaan Program Pendidikan Karakter

Dampak pendidikan karakter dikategorisasikan ke dalam empat pernyataan kualitatif yaitu, (i) belum terlihat perubahan, kondisi ini menunjukkan peserta didik belum memperlihatkan perilaku awal yang sesuai

dengan indikator yang ditentukan; (ii) mulai terlihat, apabila peserta didik mulai menunjukkan tanda-tanda awal perilaku sesuai dengan indikator yang ditentukan namun belum konsisten; (iii) mulai berkembang, apabila peserta didik menunjukkan berbagai tanda perilaku sesuai dengan indikator yang ditentukan dan sudah mulai konsisiten; dan (iv) membudaya, apabila peserta terus menerus menunjukkan perilaku sesuai dengan indikator yang ditentukan.

a. Dampak Pendidikan Karakter pada Guru

Dampak dari pelaksanaan pendidikan karakter dapat dilihat dari perubahan perilaku ke arah yang lebih baik bagi guru dan siswa. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan secara umum, dampak yang dirasakan dari pelaksanaan pendidikan karakter ini masih belum memuaskan. Dampak pendidikan karakter jika menggunakan indikator kualitatif capaian pendidikan karakter secara umum masih pada tahap mulai terlihat, hal ini berlaku baik pada guru maupun pada siswa.

Beberapa dampak yang dirasakan melalui pelaksanaan pendidikan karakter terhadap tenaga pendidik dan kependidikan menurut persepsi kepala sekolah adalah sebagai berikut. **Pertama**, mampu meningkatkan disiplin, ketertiban warga sekolah, seperti ketaatan tenaga pendidik dan kependidikan dalam menjalankan dan menerapkan peraturan sekolah. **Kedua**, mampu meningkatkan kebersihan di lingkungan sekolah. Hal ini

terlihat dengan kesadaran tenaga pendidik dan kependidikan untuk membuang sampah pada tempatnya, merawat sarana dan prasaran sekolah, serta menjaga kebersihan lingkungan sekolah. **Ketiga**, mampu meningkatkan kedisiplinan warga sekolah, antara lain dengan hadir tepat waktu, meninggalkan kelas sesuai dengan waktu pelaksanaan pembelajaran (tidak meninggalkan kelas sebelum waktunya). **Keempat**, mampu meningkatkan kerukunan warga sekolah. Dengan pendidikan karakter kerjasama dan jalinan komunikasi antara tenaga pendidik dan kependidikan semakin baik. **Kelima**, mampu meningkatkan kepedulian sosial antar warga sekolah, dengan membantu jika diantara tenaga pendidik dan kependidikan adalah yang mengalami kemalangan atau musibah. **Keenam**, mampu meningkatkan peribadatan warga sekolah. Dalam meningkatkan peribadatan warga sekolah dilakukan antara lain dengan Shalat berjamaah atau beribadat bersama. Selain itu peningkatan peribadatan warga sekolah untuk beberapa daerah merupakan salah satu upaya yang juga digiatkan oleh pemda masing-masing. **Ketujuh**, dampak pelaksanaan pendidikan karakter meningkatkan kemandirian warga sekolah. Kemandirian guru dapat dilihat dengan tidak saling menggantungkan tanggung jawab kepada guru lain/warga sekolah atau jika guru (tenaga pendidik) mengalami kesulitan maka guru secara personal mencari solusi untuk kendala yang ditemui, antara lain dengan berdiskusi pada MGMP ataupun kepada pihak yang dirasa lebih paham.

Tabel 1

Persepsi Kepala Sekolah Terhadap Dampak Pendidikan Karakter Pada Tenaga Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Komponen Penilaian		Indikator			
		Belum Terlihat	Mulai Terlihat	Mulai Berkembang	Mulai Membudaya
1	Ketertiban	0,00	22,92	52,08	25,00
2	Kebersihan	0,00	16,67	52,08	31,25
3	Kedisiplinan	0,00	20,83	43,75	35,42
4	Kerukunan	0,00	8,33	41,67	50,00
5	Kepedulian sosial	0,00	16,67	37,50	45,83
6	Peribadatan	0,00	14,58	35,42	50,00
7	Kemandirian	8,33	18,75	52,08	20,83

Dari data di atas secara umum diperoleh gambaran mengenai dampak pelaksanaan pendidikan karakter pada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan secara umum sudah mulai nampak. Berdasarkan persepsi para kepala sekolah diketahui bahwa pelaksanaan pendidikan karakter ada yang telah berdampak pada tahap berkembang, dan membudayanya di beberapa nilai karakter pada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Nilai-nilai yang dinilai mulai berkembang dikalangan guru dan tenaga kependidikan antara lain nilai “kebersihan”, ketertiban, dan kemandirian. Selanjutnya nilai-nilai yang mulai membudaya di kalangan guru dan tenaga kependidikan lainnya yaitu nilai “kerukunan” dan “peribadatan”. Hal tersebut mengindikasikan bahwa dampak pendidikan karakter telah dirasakan dampaknya, walaupun belum sepenuhnya optimal untuk seluruh nilai dan belum membudaya secara menyeluruh.

Dampak Terhadap Siswa

Dampak penanaman nilai-nilai karakter pada siswa secara umum tidak berbeda dengan

dampak yang terjadi pada tenaga pendidik dan kependidikan. Pelaksanaan pendidikan karakter belum berkembang sebagai pengembangan nilai-nilai secara lebih baik dan belum menjadi budaya di kalangan siswa. Hal tersebut ditengarai karena pengaruh lingkungan di luar sekolah yang sangat besar terhadap perubahan sikap siswa.

Dari hasil pengamatan dan FGD dengan kepala sekolah dan guru nilai karakter yang dapat diamati pada kegiatan siswa adalah sebagai berikut.

Religius, Ini merupakan nilai yang mencerminkan sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Pada nilai religius secara umum sekolah-sekolah telah melakukan sholat berjamaah, dan tadarus, bagi siswa muslim dan diabsen khusus melalui ketua kelas, dan bagi siswa beragama lain juga dilakukan ibadah pada hari Imtaq. Kegiatan Imtaq bagi

siswa muslim umumnya dilakukan setiap hari Jum'at diawali dengan sholat dhuha dan ceramah oleh siswa. Sikap dan perilaku yang religius tersebut merupakan indikasi kuat sebagai dampak yang positif pendidikan karakter. Namun, kondisi itu tidak terjadi di semua sekolah, masih ditemukan sekolah-sekolah di beberapa daerah yang sepi (tidak ada warga sekolah yang melakukan kegiatan keagamaan), selain itu tidak semua sekolah memiliki budaya bersalaman jika bertemu.

Jujur. Nilai Jujur adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Pada nilai kejujuran secara umum dalam diskusi (DKT) memang sulit untuk diamati, yang paling mudah adalah pada kegiatan pembelajaran khususnya pada “menyontek” dan barang hilang. Indikator nilai kejujuran adalah semakin sedikit angka siswa yang mencontek, konsekuensi bagi siswa yang ketahuan mencontek, maka lembar ujian tersebut langsung disobek, bahkan akan diproses ke walikelas, guru Bimbingan Konseling dan walimurid serta siswa wajib mengulang diruang guru dan setiap pelanggaran siswa akan diberikan Surat Peringatan pertama sampai Surat Peringatan ketiga.

Toleransi. Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Secara umum toleransi antar umat beragama sudah cukup baik,

sebagai contoh Di Makasar, nilai Toleransi yang sudah dirasakan adalah bagi siswa yang beragama non muslim akan ikut menggunakan penutup kepala selama berada di sekolah. Ini merupakan indikasi kuat sebagai dampak yang positif dari pendidikan karakter.

Disiplin. Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Secara umum dampak penanaman nilai-nilai disiplin terhadap siswa sudah mulai terlihat perkembangannya, walaupun belum menyeluruh di seluruh daerah. Perkembangan yang positif sebagai contoh implementasi nilai disiplin di SMK Penerbangan Sidoarjo adalah dari cara berpakaian siswa harus selalu rapi (dari jam pertama sampai terakhir), selain itu siswa putra tidak diperbolehkan berambut panjang dan untuk meningkatkan disiplin Apel pagi selalu diikuti siswa setiap hari.

Kreatif. Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. Secara umum sudah ada kreatifitas walaupun masih kecil. Untuk Sekolah Menengah Kejuruan tingkat kreatifitas lebih baik dibanding siswa Sekolah Menengah Atas. Hal ini dikarenakan atmosfer tuntutan SMK memang untuk menghasilkan produk-produk inovasi yang berbentuk fisik, sehingga produk-produk dari SMK lebih terlihat jika dibandingkan dengan SMA.

Cinta Tanah Air. Nilai ini menunjukkan cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa,

lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Penanaman nilai cinta tanah air banyak dilakukan sekolah melalui kegiatan pentas seni yang menggambarkan cinta tanah air, (dorongan untuk penggunaan produk dalam negeri) ilustrasi bela negara dan, kepahlawan. Dampak pendidikan karakter pada nilai cinta tanah air ini, sudah dirasakan dampak positifnya. Sebagai contoh sekolah-sekolah di Kota Gowa mengadakan kerjasama antara kepala sekolah dengan koramil untuk mengisi acara pada setiap tanggal 17 Agustus dengan berbagai lomba dan kegiatan cinta tanah air yang dilaksanakan oleh para siswa dengan membentuk panitia bersama dalam kepanitiaan “forum cinta tanah air”. Secara tidak langsung acara-acara ini meningkatkan pengetahuan mengenai tanah air dan meningkatkan kecintaan siswa terhadap tanah air.

Bersahabat/Komunikatif. Nilai karakter ini menunjukkan adanya tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. Hasil pengamatan, di sekolah memperlihatkan bahwa para siswa umumnya telah menerapkan nilai karakter bersahabat dengan sangat baik. Secara umum siswa telah melakukan proses berkomunikasi selama di sekolah, baik kepada sesama siswa maupun kepada guru dan seluruh warga sekolah, namun selain temuan positif juga ditemukan perilaku-perilaku negatif untuk nilai bersahabat/komunikatif, seperti warga sekolah yang tidak ramah terhadap tamu sekolah (tidak

melakukan; senyum, salam, sapa (3S). Hal ini merupakan indikasi kuat sebagai dampak yang positif dari pendidikan karakter.

Gemar Membaca. Dampak penanaman nilai gemar membaca, umumnya mulai berkembang, namun dari hasil DKT dan pengamatan perilaku gemar membaca siswa tampaknya masih rendah. Indikasinya terlihat dari sedikitnya jumlah siswa yang berkunjung ke perpustakaan. Hal ini disebabkan oleh kebijakan sekolah yang belum mewajibkan siswa untuk berkunjung ke perpustakaan dan kelengkapan buku-buku di perpustakaan yang masih kurang. Pada sekolah-sekolah yang mempunyai peraturan mewajibkan siswanya berkunjung ke perpustakaan memperlihatkan dampak yang cukup baik, namun sekolah-sekolah yang tidak mewajibkan siswanya kunjungan ke perpustakaan dari hasil pengamatan jumlah pengunjung perpustakaan sangat sedikit. Sebagai contoh di Palembang, terdapat SMA 1 yang telah memiliki budaya gemar membaca, dampak ini merupakan hasil dari program Budaya Gemar Menulis dan Membaca (BUGEMM), setiap murid dalam 1 semester diwajibkan membuat karya tulis yang dibimbing oleh guru dengan ketentuan siswa mengikuti penulisan standar ilmiah baku. Kegiatan BUGEMM ini juga melibatkan guru untuk berperan membantu siswa menghasilkan karya tulis yang baik, dimana guru dalam kegiatan ini diberikan SK dan intensif untuk perkerjaannya.

Peduli Lingkungan. Nilai ini menunjukkan sikap dan tindakan yang selalu berupaya

mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Penanaman nilai-nilai peduli lingkungan secara umum sudah cukup baik, khususnya pada sekolah-sekolah adiwiyata. Untuk nilai peduli lingkungan sangat dapat dirasakan bagi sekolah-sekolah yang berstatus Adiwiyata. Sebagai contoh di Palembang, terdapat kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan yang dilakukan siswa dengan *Nature Club*. Kegiatan dari *Nature Club* adalah dengan menanam pohon disetiap kegiatan yang dilaksanakan sekolah, melakukan daur ulang sampah secara bergilir oleh siswa.

Peduli Sosial. Nilai ini merupakan sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Dibeberapa kota yang menjadi sampel penelitian, nilai peduli sosial dilakukan dengan Siswa mengumpulkan uang kebersamaan. Dampak peduli sosial yang terlihat masih dalam tataran pembiasaan dan belum dalam tataran jangka panjang, hal ini terlihat di Palembang, ketika ada Guru yang sedang sakit (kaki dalam kondisi diperban) berusaha menyeberang jalan, tidak ada satu pihak pun yang membantu.

Tanggung-jawab. Nilai ini merupakan wujud sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

Nilai tanggungjawab dibudayakan di SMA Antartika Sidoarjo melalui kegiatan penugasan sebagai pembina upacara oleh siswa. Secara perlahan kegiatan ini meningkatkan rasa bertanggung jawab pada siswa.

SIMPULAN DAN USULAN KEBIJAKAN

Simpulan

Pemerintah kabupaten/kota umumnya belum memiliki kebijakan pendidikan karakter untuk sekolah di wilayahnya, baik berupa perda maupun petunjuk teknis lainnya. Kebijakan pemerintah daerah yang mengarah pada pembangunan karakter biasanya ditujukan bagi seluruh warga terkait dengan keagamaan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan penghijauan, sehingga dirasakan oleh sekolah masih kurang kuat dijadikan sebagai dasar panduan pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah.

Di tingkat sekolah hampir seluruh sekolah memiliki kebijakan pendidikan karakter ada yang tertulis dan tidak tertulis. Kebijakan tertulis dirumuskan dalam visi dan misi serta program sekolah dan dan didokumentasikan, sedangkan kebijakan lisan hanya disampaikan pada kegiatan rapat dan upacara secara lisan. Kebijakan pendidikan karakter umumnya mengembangkan 5-10 nilai karakter yang disepakati sesuai dengan kondisi dan lingkungan sekolah. Nilai-nilai itu selanjutnya dijadikan pedoman dan peraturan sekolah

selanjutnya disampaikan pada seluruh warga sekolah.

Pendidikan karakter di sekolah secara umum belum dilaksanakan secara konsisten hal ini antara lain disebabkan oleh: komitmen kepala sekolah masih lemah kurang mendapatkan dukungan warga sekolah, dan tidak ada evaluasi yang berkelanjutan dari program yang telah ditetapkan.

Sekolah umumnya telah melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan mengevaluasi program pendidikan karakter di sekolahnya. Perencanaan dilaksanakan melalui dua langkah, yaitu perencanaan pada lingkup sekolah (program sekolah) dan perencanaan pada lingkup pembelajaran (individu guru). Perencanaan pada lingkup sekolah dilaksanakan melalui rapat kerja tahunan, sedangkan perencanaan pada lingkup pembelajaran menyangkut kegiatan individu guru matapelajaran untuk penyusunan RPP.

Penyusunan RPP yang dilakukan guru mata pelajaran sudah berupaya mengintegrasikan dan memasukkan nilai-nilai karakter yang ditetapkan sekolah. Namun tidak semua nilai-nilai karakter yang ditetapkan tersebut selalu diintegrasikan seluruhnya dalam RPP, tetapi dipilih yang relevan dan sesuai dengan topik bahasan RPP. Sebagai contoh, penyusunan RPP memasukkan nilai-nilai kejujuran, toleransi, kreatif, rasa ingin tahu, rasa percaya diri, dan mandiri pada pokok-pokok bahasan tertentu dalam RPP.

Strategi pelaksanaan pendidikan karakter umumnya dilaksanakan melalui kegiatan integrasi dalam pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, pembudayaan sekolah (pembiasaan, pengkondisian, keteladanan, kegiatan rutin sekolah, dan kegiatan spontan).

Dalam pelaksanaannya guru-guru masih mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter dalam mata pelajaran.

Program pendidikan karakter yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan menunjukkan adanya dampak yang positif terhadap sikap dan perilaku siswa. Pada awalnya pendidikan karakter ini harus dipaksakan, kemudian naik menjadi dibiasakan, dan akhirnya menjadi budaya. Banyak hal baik yang menjadi budaya di sekolah, terutama kedisiplinan dari warga sekolah semakin meningkat.

USULAN KEBIJAKAN

Diperlukan kebijakan tentang gerakan nasional pendidikan karakter secara menyeluruh berkelanjutan di setiap jenjang pendidikan dengan didukung dana yang memadai. Gerakan ini dilakukan sebagai upaya penerapan revolusi mental secara menyeluruh dari tingkat pusat, daerah, satuan pendidikan dan masyarakat. Pemerintah pusat perlu mengeluarkan peraturan tentang gerakan nasional pendidikan karakter berupa peraturan pemerintah (PP) yang mengatur tentang; peran

dan fungsi pemerintah daerah dan lembaga terkait serta menyusun petunjuk teknis pelaksanaan yang antara lain meliputi; peran dan fungsi lembaga, sosialisasi, pendanaan, buku panduan dan pelatihan. Hal-hal yang perlu dilakukan antara lain:

- a. Diperlukan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah yang bersifat mengikat berupa peraturan pemerintah atau permen dan peraturan daerah yang dapat dijadikan dasar hukum pelaksanaan pendidikan karakter di tingkat satuan pendidikan. Kebijakan ini selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat dan sekolah-sekolah, sebagai gerakan nasional pendidikan karakter di seluruh wilayah Indonesia yang didukung oleh pemerintah pusat, propinsi, kab/kota, kecamatan, kelurahan, dan RW/RT.
- b. Di tingkat satuan pendidikan perlu optimalisasi peran kepala sekolah dan guru dalam pendidikan karakter, khususnya terkait dengan komitmen kepala sekolah dan guru perlu ditingkatkan.
- c. Pelaksanaan pendidikan karakter perlu dievaluasi secara periodik ketercapainnya baik pada tingkat pemerintah /pemerintah daerah (sisi kebijakan) maupun di tingkat satuan pendidikan dari sisi pelaksanaannya. Hasil evaluasi ditindaklanjuti, dan dijadikan dasar sebagai perbaikan program.

- d. Perlu keteladanan nilai-nilai karakter yang terus menerus dilakukan dalam kegiatan pembelajaran maupun pembiasaan di tingkat sekolah dan masyarakat. Keteladanan dilakukan oleh kepala sekolah, guru, warga sekolah, keluarga dan komponen masyarakat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andika, Prabowo, 2014. *Dua Puluh Dua Persen Pengguna Narkoba adalah Pelajar*.
<http://nasional.sindonews.com/read/2013/08/21/15/773842/>, diakses tanggal 17 Februari.
- Daryanto, 2013. *Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah*, Yogyakarta, Gava Media.
- Gunawan, Heri. 2012. *Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta.
- Hermawan, Erwan, 2014. *Tawuran Sekolah Jakarta Naik 44 persen*.
<https://m.tempo.co/read/news/2013/11/20/083531130> diakses tanggal 17 Februari.
- Husaini, Adian. 2010. *Membentuk Manusia Berkarakter dan Beradab*. Disampaikan dalam Seminar Pendidikan Karakter di UPI, Bandung, 28 Juli 2010.
- Jonaidi. 2013. Analisis Sosiologis Terhadap Perilaku Menyimpang Siswa Pada SMA Pembangunan Kabupaten Malinau. *E-Journal Sosiatri-Sosiologi Volume 1, Nomor 3*.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2010. *Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2010-2014*. Jakarta.
- Kementerian Pendidikan Nasional, 2010a. *Bahan Pelatihan Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*, Pusat Kurikulum. Jakarta.
- Kementerian Pendidikan Nasional, 2010b. *Rencana Aksi Nasional Pendidikan Karakter*. Jakarta.
- Kusuma, Doni, 2007. *Pendidikan Karakter Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*, Jakarta. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Libertus Jehani dan Antoro dkk, 2006. *Mencegah Terjerumus Narkoba*, Visimedia. Jakarta.
- Lickona, Thomas. 2010. *Educating for Character (Mendidik untuk Membentuk Karakter)* terjemahan Juma Abdu Wamaungo. Jakarta, Bumi Aksara.
- Lickona, Thomas. 2012. *Character Matter (Persoalan Karakter)* terjemahan Juma Abdu Wamaungo, Jakarta, Bumi Aksara.
- Megawangi, Ratna. 2004. *Pendidikan Karakter; Solusi yang Tepat untuk Membangun Bangsa*. Jakarta: Indonesia Heritage Foundation.
- Megawangi, Ratna. 2009. *Pendidikan Karakter Solusi yang Tepat untuk membangun Bangsa*, Jakarta. Indonesia Heritage Foundation.
- Nugroho, Hery. 2012. *Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 3 Semarang*. Tesis. Semarang: Program Magister (S2) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.
- Republik Indonesia. 2010. *Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025*. Jakarta.

- Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014*. Jakarta.
- Rohmah, Dewi, 2012. *Implementasi pendidikan karakter pada Proses Pembelajaran Kelas X SMA Negeri 1 Welahan Kabupaten Jepara*. Skripsi. Semarang: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.
- Suyanto, 2010. *Urgensi Pendidikan Karakter*. <http://waskitamandiribk.wordpress.com>. Diunduh pada 26 April 2014.
- Yaumi, Muhammad. (2010). *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa melalui Transdisiplinaritas*. <http://www.bharatbhasha.com/education.php/208471>. Diunduh pada 25 April 2014.